

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menghadapi arus globalisasi, pemerintah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan terutama di Negara berkembang salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam zaman yang serba global peran pemerintah untuk melakukan pembangunan merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih baik dalam bidang ekonomi. Dalam melaksanakan suatu pembangunan nasional diperlukan dana cukup besar, digunakan sebagai modal dalam membiayai pengeluaran – pengeluaran yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Ketercapaian pembangunan nasional dapat terjadi jika semua pihak mendukung dan memberikan kontribusi penuh terhadap setiap program yang di buat oleh pemerintah guna mensukseskan Pembangunan Nasional. Salah satunya adalah keberhasilan pembangunan di setiap daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan keuangan disuatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dari setiap daerah yang ada di Indonesia.

Saat terjadi Otonomi Daerah Tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang terakhir di revisi dengan Undang – Undang No 23 Tahun 2014. Dengan adanya Undang – Undang tersebut berdampak terhadap reformasi perpajakan, membawa perubahan pada sistem pemungutan pajak yakni pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak dipungut oleh pemerintah daerah. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar peran Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua hasil usaha dan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut (Halim, 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan dalam membiayai setiap pembangunan yang dikelola dengan baik disuatu daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas berbagai daerah dan provinsi yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber dana pemerintah adalah pajak. Untuk

membayai pembangunan secara merata dibutuhkan dana yang tidak sedikit salah satunya bersumber dari pajak. Jenis Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat disebut pajak pusat atau pajak provinsi dan pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah disetiap daerah disebut pajak daerah atau pajak kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Salah satu pajak Provinsi yang memiliki potensi paling besar dan terus berkembang adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penyumbang dana terbesar untuk pendapatan asli daerah. Menurut Tungka dan Sabijono (2005) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang beroda dua atau lebih yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik seperti mesin baik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak. Berikut ini adalah perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenisnya dari Tahun 2012 – 2017.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis**  
**Tahun 2012 – 2017 Di Indonesia**

Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	10.432.259	11.484.514	12.599.038	13.480.973	14.580.666	15.493.068
Mobil Bis	2.273.821	2.286.309	2.398.846	2.420.917	2.486.898	2.509.258
Mobil Barang	5.286.061	5.615.494	6.235.136	6.611.028	7.063.433	7.523.550
Sepeda Motor	76.381.183	84.732.652	92.976.240	98.881.267	105.150.082	113.030.793
Jumlah	94.373.324	104.118.969	114.209.260	121.394.185	129.281.079	138.556.669
% Kenaikan	-	11 %	12 %	13 %	14 %	15 %

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Tabel 1.1, terlihat bahwa kenaikan Jumlah Kendaraan Bermotor jika dipersentase tersebut setiap tahunnya perkembangan terus mengalami peningkatan, dengan demikian potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terus meningkat. Potensi Penerimaan Pajak merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penetapan tersebut telah disesuaikan dengan keadaan daerah disetiap wilayah terkhusus di Kabupaten Bondowoso.

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang letaknya di Kabupaten Bondowoso. Penerimaan pajak provinsi yang cukup menonjol di UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor. Berikut ini adalah realisasi Penerimaan Kas untuk Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
	Rp	%
2013	30.385.871.355	-
2014	33.475.900.297	33
2015	37.590.071.980	37
2016	40.934.717.876	40
2017	45.871.603.546	45

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

Berdasarkan data dari tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa setiap tahunnya total Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kas yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jika dibandingka kenaikan Jumlah Kendaraan Bermotor dengan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor keduanya mengalami peningkatan hanya saja terdapat perbedaan angka yang signifikan.

Menurut Khaeril Anwar (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa jumlah kendaraan brmotor terus mengalami kenaikan yang cukup tajam dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi, efktivitas Pajak Kendaraan Bermotor tidak efektif karena persentase yang didapat dibawah 100%. Selanjutkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rian Rochadi Ismail (2018) yang

berjudul Analisis Efektifitas, Kontribusi, Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa untuk potensi pajak kendaraan bermotor di Gorontalo, hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cukup tinggi setiap tahunnya. Peningkatan potensi terjadi seiring dengan meningkatnya kemajuan ekonomi di Kota Gorontalo setiap tahunnya. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor, terlihat mengalami peningkatan. Jika dilihat lebih detail lagi ternyata diketahui bahwa kenaikan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang terjadi bukan disebabkan adanya kenaikan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melainkan adanya penurunan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh Provinsi Gorontalo. Untuk efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil yang baik dimana secara historis, rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo menunjukkan hasil yang pada umumnya diatas 100%. Kontradiksi diantara kedua penelitian tersebut membuat penelitian tentang Pajak Kendaraan Bermotor ini perlu dikaji ulang dan penerapannya dilakukan di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Daya Pajak, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013 - 2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013 - 2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

## **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Dengan dasar pemikiran diatas, penulis bermaksud mengidentifikasi masalah berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Kendaraan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.
2. Bagaimana Daya Pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Darah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pajak Kendaraan di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso
2. Untuk Mengetahui Daya Pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.
3. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan penelitian penulis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan secara mendalam tentang Daya Pajak, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. Serta sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bagi Akademisi  
Penelitian ini berguna sebagai literatur serta sebagai pelengkap bahan pustaka.
3. Bagi Instansi  
Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pemikiran di dalam menjalankan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Bagi pihak lain  
Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan perbandingan dalam membahas Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah.